

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sosial Forestri merupakan sebuah konsep pengelolaan hutan dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak rakyat, untuk melakukan pengelolaan, reforestrasi, pelestariaan, pembangunan, demi kemajuan potensi yang ada dalam hutan (Rikaltra, 2022). Sebagai sebuah bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku utamanya, konsep ini menandai pergeseran paradigma kehutanan yang fundamental. Jika sebelumnya pengelolaan hutan didominasi oleh pendekatan sentralistik yang menempatkan negara atau korporasi sebagai pemegang kendali penuh (*state-based forest management*), Sosial Forestri menempatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki kapasitas dan kearifan lokal untuk menjaga kelestarian ekosistem (Rikaltra, 2022).

Pemerintah turut andil dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mengelola hutan melalui lima jalur utama. Kelima skema legal tersebut meliputi Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), serta skema Kemitraan Kehutanan. Legalitas ini menjadi instrumen vital untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan dan konflik tenurial yang selama ini terjadi, memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mengelola lahan tanpa rasa takut, sekaligus menutup celah bagi pihak luar yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kawasan hutan (Syofiarti et al, 2023).

Pada intinya, Perhutanan Sosial didesain untuk menyelaraskan tiga pilar keberlanjutan, yakni kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Inisiatif ini berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan seperti ekowisata, serta penerapan sistem agroforestri yang produktif (Zakia et al., 2024). Sementara dari sisi ekologi, keterikatan masyarakat terhadap

hutan diharapkan mampu mempertahankan tutupan lahan dan fungsi hidrologis hutan, karena masyarakat menyadari bahwa kerusakan hutan akan berdampak langsung pada sumber penghidupan mereka.

Pada awalnya, masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan sering dianggap sebagai perambah atau ancaman bagi kelestarian hutan (Ratri et al., 2024). Namun, melalui Sosial Forestri, posisi mereka diubah menjadi mitra utama, sehingga dapat dianggap sebagai upaya negara untuk memberikan akses legal kepada masyarakat, menyeimbangkan keadilan penguasaan lahan (*tenure*), serta menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Masyarakat didorong untuk memadukan tanaman kehutanan (kayu-kayuan) dengan tanaman pertanian jangka pendek atau buah-buahan untuk kebutuhan ekonomi harian. Dinamika muncul ketika desakan ekonomi membuat masyarakat lebih memprioritaskan tanaman komersial (seperti sawit atau sayuran intensif) yang kadang berisiko menggerus fungsi lindung hutan (Triwanto, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan Sosial Forestri sangat bergantung pada seberapa mampu skema ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi produk hasil hutan bukan kayu, sehingga masyarakat tidak perlu menebang pohon untuk bertahan hidup.

Banyaknya NGO dan Yayasan yang bekerja untuk Sosial Forestri. Sebagai contoh, dengan target alokasi lahan seluas 12,7 juta hektare, KLHK menghadapi keterbatasan jumlah penyuluhan kehutanan di tingkat tapak. Data yang menunjukkan bahwa ribuan izin perhutanan sosial atau (PS) yang telah terbit sering kali "mati suri" tanpa pendampingan intensif (Salim & Utami, 2020). Di sinilah NGO masuk mengisi ruang kosong tersebut, yang awalnya sebagai pengawas pemerintah, bertransformasi menjadi mitra pelaksana. Organisasi seperti World Resources Institute (WRI Indonesia) atau JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), berperan dalam menyediakan data spasial presisi untuk memetakan wilayah adat dan desa, meminimalkan konflik tenurial yang sering menghambat proses perizinan.

Dalam tataran implementasi lapangan, terdapat sebuah kasus dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI WARSI) di Jambi menjadi contoh dari keberhasilan intervensi NGO. Pada kasus Hutan Desa Lubuk Beringin (Hutan Desa pertama di Indonesia), WARSI mendampingi proses legalitas dan memperkenalkan inovasi model ekonomi konservasi bernama "Pohon Asuh". Melalui skema ini, masyarakat luas dapat "mengadopsi" pohon durian atau pohon hutan lainnya dengan memberikan donasi biaya perawatan kepada warga desa. Kasus ini menjadi bukti NGO mampu menciptakan pasar baru yang menghargai jasa lingkungan, sehingga masyarakat mendapatkan insentif ekonomi nyata untuk tidak menebang pohon, sebuah narasi yang sulit dicapai jika masyarakat berjalan sendiri tanpa jaring eksternal NGO (Seftiani, 2024).

Kasus pengembangan komoditas rotan di Kalimantan atau kopi di berbagai wilayah perhutanan sosial dapat menjelaskan bagaimana NGO mengonsolidasikan beberapa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam satu kawasan ekologis untuk mencapai skala ekonomi (Imam & Arifin, 2024). Mereka menghubungkan petani langsung dengan *off-taker* (pembeli besar) atau industri, memutus rantai distribusi yang panjang. Ini mengubah wajah perhutanan sosial dari sekadar "program bagi-bagi lahan" menjadi inkubator bisnis berbasis komunitas yang riil.

Berdasarkan uraian dinamika di atas, terlihat jelas bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) di Indonesia tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara regulasi pemerintah dan pendampingan intensif di tingkat tapak. Kehadiran berbagai NGO dan yayasan terbukti menjadi katalisator vital dalam menjembatani kesenjangan kapasitas masyarakat, baik dalam aspek legalitas, tata kelola, maupun pengembangan ekonomi berkelanjutan. Di tengah ekosistem pendampingan yang masif ini, Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) menempati posisi strategis dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kelestarian ekologis, tetapi juga menekankan aspek humanis dan kesejahteraan.

Lembaga Alam Tropika (LATIN) sebagai salah satu lembaga yang peduli terhadap lingkungan, hutan adat di Indonesia. Memiliki visi yaitu untuk menjadikan

ekosistem hutan di Indonesia agar tetap kaya, lestari, serta memberikan dampak Kemakmurhan, Kebahagiaan dan Kemandirian untuk masyarakat. Untuk mewujudkan visi kemandirian dan kebahagiaan tersebut, LATIN menerapkan strategi yang mendobrak paradigma konservasi lama. Jika dulu konservasi sering dianggap "memisahkan manusia dari hutan", LATIN justru menjadikan masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan. LATIN sangat gencar mengadvokasi bahwa masyarakat adat dan lokal bukanlah ancaman, melainkan garda terdepan penjaga hutan. Strategi ini diimplementasikan melalui pendampingan intensif untuk mendapatkan legalitas pengelolaan (seperti Hutan Adat atau Hutan Kemasyarakatan), yang menjadi pondasi awal bagi masyarakat untuk merasa "memiliki" dan bertanggung jawab atas kelestarian kawasan tersebut.

LATIN menerjemahkan "kemakmurhan" melalui pendekatan kewirausahaan sosial berbasis potensi lokal. LATIN menyadari bahwa hutan tidak akan lestari jika perut masyarakat lapar. Oleh karena itu, mereka mengembangkan program-program yang meningkatkan nilai tambah komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK). LATIN membantu petani hutan mengubah pola pikir dari sekadar "penjual bahan mentah" menjadi "produsen produk jadi". Contoh nyata dari pendekatan ini adalah pengembangan produk pangan sehat dari hutan (seperti madu hutan, gula aren, atau kopi shade-grown) yang dikemas dengan narasi konservasi, sehingga bisa dijual dengan harga premium ke pasar perkotaan yang lebih sadar lingkungan.

LATIN juga fokus pada aspek "kebahagiaan" dan "kemandirian" melalui pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*). Mereka tidak ingin masyarakat terus-menerus bergantung pada pendamping luar. Oleh karena itu, LATIN aktif mencetak kader-kader lokal dan mendirikan sekolah lapang atau pusat pembelajaran komunitas. Di sini, masyarakat belajar tidak hanya soal teknis budidaya, tetapi juga soal berorganisasi, resolusi konflik, dan literasi pasar. Dengan cara ini, ketika LATIN perlahan mengurangi pendampingannya (*phasing out*), sistem sosial yang terbangun di masyarakat sudah cukup tangguh untuk

menghadapi tantangan eksternal, memastikan visi "bangsa yang bahagia" tercapai secara berkelanjutan.

Visi LATIN untuk menjadikan ekosistem hutan Indonesia tetap kaya dan lestari, sekaligus memberikan dampak kemandirian, kemakmuran, serta kebahagiaan bagi bangsa, menawarkan perspektif yang holistik dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini menjawab tantangan zaman di mana hutan tidak lagi sekadar dilihat sebagai aset kayu, melainkan sebagai ruang hidup yang harus menyejahterakan masyarakat di sekitarnya tanpa mengorbankan fungsinya. Bagaimana LATIN mengoperasionalkan visi tersebut di tengah tantangan lapangan yang kompleks menjadi sebuah pembelajaran empiris yang sangat berharga.

Dalam kerangka tersebut, kegiatan magang di Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) menjadi langkah strategis bagi penulis untuk memahami secara langsung praktik terbaik (*best practices*) implementasi Perhutanan Sosial sebagai program nasional KLHK. Melalui posisi sebagai *Content Strategist Intern* di divisi *Science Communication Hub*, penulis berperan dalam mengembangkan dan menyebarluaskan isu Perhutanan Sosial kepada publik. Fokus utama kegiatan magang ini adalah merancang strategi konten dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi sains untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap Perhutanan Sosial, advokasi kebijakan kehutanan, serta praktik pemberdayaan masyarakat berbasis hutan.

Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran akademik dan praktis bagi penulis, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung agenda nasional Perhutanan Sosial melalui penguatan komunikasi, edukasi publik, dan diseminasi pengetahuan kepada masyarakat luas.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang ini merupakan kewajiban akademik yang harus dituntaskan sebagai syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara. Di luar tuntutan kurikulum, program ini bertujuan memberikan paparan nyata kepada mahasiswa mengenai dinamika dan tantangan di dunia profesional, khususnya di sektor organisasi non-profit (NGO) yang fokus pada lingkungan dan

pemberdayaan. Melalui kesempatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memperluas wawasan profesional serta memupuk karakter positif seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan etos kerja yang krusial bagi karier mereka kelak.

Melalui praktik kerja magang, adapun tujuan dari kerja magang yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan akan perhutanan sosial melalui proses kerja di Divisi *Science Communication Hub* pada Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN).
2. Mengimplementasikan secara langsung ilmu yang diperoleh dari mata kuliah *Art, Copywriting & Creative Strategy* serta *Social Media & Mobile Marketing Strategy*. Beragam kompetensi, mulai dari pengembangan konten, perencanaan strategis, hingga kemampuan berpikir analitis, diterapkan secara nyata untuk mendukung penyelesaian tugas selama masa magang berlangsung.
3. Mengasah kemampuan *softskills* seperti komunikasi tim, kolaborasi lintas divisi, serta kemampuan *problem-solving* dalam situasi dinamis. Selain itu, meningkatkan *hardskills* seperti perencanaan strategi komunikasi publik untuk mendukung program yang ada selama melaksanakan kerja magang pada Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN).

1.3 Deskripsi Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja

Berisi detail waktu kerja beserta prosedur pelaksanaan dari saat melamar sampai dengan selesai dari tempat kerja.

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja

Peran sebagai *Content Strategist Intern* di divisi *Science Communication Hub*, Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), dijalankan oleh penulis mulai bulan September sampai dengan Desember 2025. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi dalam kerangka program *Social Impact Initiative*, kegiatan ini telah memenuhi total durasi kerja sebanyak 640 jam.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti sesi pembekalan terkait *Social Impact Initiative* yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara melalui *Zoom Meeting* sebagai langkah awal orientasi dan pemahaman teknis program.
- 2) Mengikuti partisipasi dalam sesi orientasi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Pembekalan yang dilakukan secara daring melalui platform *Zoom Meeting* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek teknis serta gambaran umum pelaksanaan program *Social Impact Initiative*.
- 3) Melakukan pengajuan dokumen melalui portal prostep.umn.ac.id dengan mengunggah Formulir PRO-STEP-01. Langkah prosedural ini dilakukan agar pihak Program Studi dapat menerbitkan Surat Pengantar Magang resmi yang ditujukan kepada mitra kerja, yakni Lembaga Alam Tropika Indonesia.
- 4) Memperoleh persetujuan resmi dari Program Studi dalam bentuk Surat Pengantar Magang yang ditujukan kepada Lembaga Alam Tropika Indonesia sebagai instansi pelaksana magang.
- 5) Melengkapi informasi pribadi, data lembaga tempat magang (Lembaga Alam Tropika Indonesia), serta mengunggah Surat Penerimaan Magang pada situs prostep.umn.ac.id sebagai syarat final administrasi.
- 6) Menghadiri pertemuan perdana *Social Impact Initiative* pada 15 Agustus 2025 yang dilaksanakan di Collabo Space, Gedung D Lantai 7 UMN, untuk pemaparan teknis pelaksanaan dan koordinasi awal peserta program.
- 7) Mengunduh dan mempersiapkan formulir pendukung administrasi magang, yaitu Surat Pengantar Magang (PRO-STEP 01), Kartu Pelaksanaan Magang (PRO-STEP 02), Daily Task (PRO-STEP 03),

Verifikasi Laporan (PRO-STEP 04) dan Surat Penerimaan Magang (PRO-STEP 05) sebagai dokumen wajib dalam penyusunan laporan akhir kegiatan magang.

B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

- 1) Proses pendaftaran program sendiri telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 11 Juli 2025 melalui pengisian *Google Form*. Dalam tahap seleksi *Social Impact Initiative* tersebut, penulis menyerahkan kelengkapan berkas yang mencakup identitas diri, portofolio karya, serta proposal kreatif sebagai syarat utama penilaian.
- 2) Mengikuti tahap akhir dari rangkaian seleksi, yaitu mengikuti sesi wawancara tatap muka dengan dosen penguji pada tanggal 1 Agustus 2025. Evaluasi kelayakan peserta untuk bergabung dalam *Social Impact Initiative* ini dilaksanakan secara langsung di salah satu ruang kelas Gedung D, Universitas Multimedia Nusantara.

C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

- 1) Pelaksanaan kegiatan praktik kerja magang dijalankan pada posisi *Content Strategist* dalam *Content Creative* divisi *Science Communication* di bawah naungan Lembaga Alam Tropika Indonesia. Tugas utama yang diemban meliputi perancangan strategi konten yang efektif dan relevan untuk dipublikasikan pada laman instagram LATIN guna meningkatkan jangkauan, keterlibatan serta citra komunikasi lembaga.
- 2) Selama masa magang, proses koordinasi dan pelaksanaan tugas berada di bawah supervisi Firman Dwi selaku *Head of Division Learning Hub*, yang mengarahkan dan memantau ketercapaian target program magang secara strategis. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemagang mendapatkan pendampingan dan bimbingan intensif dari Annisa Alviani selaku Mentor dan *Head of Division Science Communication Hub*. Seluruh rangkaian aktivitas magang dijalankan melalui mekanisme monitoring terstruktur untuk memastikan kualitas *output* dan keselarasan dengan standar organisasi.

- 3) Pengisian dan penandatanganan PRO-STEP-03 (Kartu Pelaksanaan Magang) dan PRO-STEP-04 (Lembar Verifikasi) dilaksanakan selama periode kegiatan berlangsung dan diselesaikan pada akhir masa magang sebagai bagian dari proses administrasi dan evaluasi yang disahkan oleh supervisor magang.

D. Proses Pembuatan Laporan Praktik Kerja Magang

- 1) Penyusunan laporan praktik kerja magang dilaksanakan di bawah bimbingan Siti Fifthya Mauldina, selaku Dosen Pembimbing, melalui sesi konsultasi rutin yang dilakukan secara daring dan luring menggunakan platform Google Meet, serta komunikasi pendukung melalui WhatsApp.
- 2) Laporan praktik kerja magang yang telah disusun kemudian diserahkan kepada pihak Program Studi Ilmu Komunikasi untuk dilakukan peninjauan dan memperoleh persetujuan dari Kepala Program Studi sebelum menuju tahap berikutnya.
- 3) Setelah memperoleh persetujuan, laporan praktik kerja magang diajukan ke proses sidang sebagai bentuk evaluasi akhir dan penilaian komprehensif terhadap capaian kegiatan magang

